

RINGKASAN

Hidayat Syah Al Hakim NIM 200510019 **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Penelitian Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe) (Romi Asmara S.H., M.Hum. dan Hidayat, S.H., M.H.)**

Komisi Nasional Perlindungan Anak mendata kasus kekerasan pada anak pada tahun 2023 sebanyak 3.547 kasus, kasus perundungan merupakan kasus yang sering terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Lhokseumawe sebanyak 57 kasus. Perundungan cenderung terjadi di kelas X dan XI, yang terdiri atas perundungan fisik, verbal, dan *cyberbullying*. Kebijakan pencegahan dan penanganan kasus perundungan terhadap anak sangat penting dan memerlukan perhatian yang serius dalam melindungi hak-hak korban perundungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan terhadap anak dalam perspektif viktimologi di Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe, serta mengetahui hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan dalam melindungi hak-hak anak korban perundungan di Sekolah Menengah Atas di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, Aceh. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), metode pengambilan sampel melalui teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) dan dianalisis secara kualitatif.

Implementasi kebijakan pencegahan dan perundungan di Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe memerlukan perhatian serius. Pemerintah Aceh telah membentuk tim untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Hambatan dalam pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah Kota Lhokseumawe meliputi kesadaran dan pemahaman perundungan pada siswa yang minim, sumber daya dan fasilitas untuk korban terbatas, penanganan kasus tidak optimal, evaluasi dan pengawasan tidak efektif karena tidak adanya pengawas sekolah di bidang bimbingan konseling, upaya pencegahan dilakukan melalui pelatihan guru, kampanye kesadaran anti perundungan, sosialisasi, dan koordinasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua, serta memastikan perlindungan korban dan mencegah tindakan perundungan terjadi kembali.

Pemerintah Aceh melalui dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh telah membentuk satuan tugas pada tingkat daerah dan membentuk TPPK pada tingkat sekolah di seluruh kabupaten/kota, pemerintah harus melakukan penguatan sistem pelaporan, pendampingan korban, serta melakukan sosialisasi dan peningkatan sumber daya manusia serta fasilitas. Evaluasi dan pengawasan penting dilakukan dalam memantau kemajuan program pada satuan pendidikan Indonesia.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Perundungan, Viktimologi*

SUMMARY

Hidayat Syah Al Hakim *IMPLEMENTATION OF POLICIES TO PREVENT AND HANDLE BULLYING IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AGAINST CHILDREN FROM A VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE (Lhokseumawe City High School Research Study)*

NIM 200510019

(Romi Asmara S.H., M.Hum. dan Hidayat, S.H., M.H.)

The National Commission for Child Protection recorded 3,547 cases of violence against children in 2023, cases of bullying are cases that often occur in Lhokseumawe City High Schools (SMA) and Vocational High Schools (SMK) with 57 cases. Bullying tends to occur in classes X and XI, consisting of physical, verbal and cyberbullying. Policies for preventing and handling cases of bullying against children are very important and require serious attention in protecting the rights of victims of bullying.

This research aims to determine the implementation of policies for preventing and handling bullying against children from a victimology perspective in Lhokseumawe City High Schools, as well as knowing the obstacles and efforts in implementing policies for preventing and handling bullying in protecting the rights of children who are victims of bullying in High Schools in Lhokseumawe City.

This research uses empirical juridical research methods located in Lhokseumawe City, Aceh. Data was obtained through field research, sampling methods using sampling techniques with certain considerations (purposive sampling) and analyzed qualitatively.

Implementation of bullying and prevention policies in Lhokseumawe City High Schools requires serious attention. The Aceh government has formed a team to deal with violence in schools. Obstacles in preventing and handling bullying in Lhokseumawe City schools include minimal awareness and understanding of bullying among students, limited resources and facilities for victims, suboptimal case handling, ineffective evaluation and supervision due to the absence of school supervisors in the field of guidance and counseling, prevention efforts carried out through teacher training, anti-bullying awareness campaigns, outreach and coordination between schools, teachers, students and parents, as well as ensuring the protection of victims and preventing bullying from happening again.

The Aceh government, through the Aceh education and culture service, has formed a task force at the regional level and established TPPK at the school level in all districts/cities. The government must strengthen the reporting system, assist victims, as well as carry out outreach and improve human resources and facilities. Evaluation and supervision are important in monitoring program progress in Indonesian education units.

Keywords: *Criminal Act, Bullying, Victimology*